

PERSEPSI *KEY-PERSONS* TERHADAP PROSPEK PENDEKATAN *CO-MANAGEMENT* DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN DEMERSAL DI KABUPATEN REMBANG

Sofyan Eko Putra

Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro

e-mail: sofyan.eko@gmail.com

ABSTRAK

Fishing particularly for demersal fish resources is a business that plays a role in increasing the welfare of coastal communities in the Rembang District. Therefore, efforts are needed to manage a sustainable demersal fish resources. This study Co-Management approach with institutional analysis that recommended by ICLARM (Pomeroy and William, 1994 in Susilowati, 1999), which is used to prospect co-management approach and determine the management form of sustainable demersal fish resources in Rembang District. Co-Management Analysis covers physical attributes, community, institutional, actors, and the attributes of demand and supply

Keywords: Co-Management, Demersal Fish, Stakeholders, Rembang District

PENDAHULUAN

Kabupaten Rembang terletak di wilayah pesisir Pantai Utara, dengan panjang pantai 61,5 km, merupakan kabupaten dengan total produksi perikanan laut terbesar kedua di Provinsi Jawa Tengah. Namun, selama tahun 2002-2006 rata-rata pertumbuhan produksi perikanan laut per tahun menurun sebesar -4,75 persen.. Penurunan produksi tersebut, berbanding terbalik dengan rata-rata pertumbuhan armada (kapal) penangkap ikan yang meningkat sebesar 7,62 persen per tahun (lihat Tabel 1).

Tabel 1
Perkembangan Produksi, Nilai Produksi, dan Armada Perikanan Laut Kabupaten Rembang Tahun 2002-2006

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Rata-rata Pertum- buan (%) |
|------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------------------------------|
| <hr/> | | | | | | |
| Perikanan Laut | | | | | | |
| Produksi (000Kg) | 55.281,51 | 29.579,66 | 33.152,44 | 31.434,53 | 37.907,10 | |
| Nilai (Juta Rp) | 118.954,56 | 87.013,58 | 124.292,71 | 121.203,42 | 152.967,51 | |
| Armada (unit) | 3491 | 4393 | 4246 | 4636 | 4581 | |
| <hr/> | | | | | | |
| Pertumbuhan | | | | | | |
| Produksi (%) | - | -46,50 | 12,08 | -5,18 | 20,60 | -4,75 |
| Nilai (%) | - | -26,85 | 42,84 | -2,49 | 26,21 | 9,93 |
| Armada (%) | - | 25,84 | -3,35 | 9,19 | -1,19 | 7,62 |

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Rembang, 2007

Hasil penelitian FPIK UNDIP (2002) menunjukkan bahwa pemanfaatan sumberdaya perikanan laut, terutama jenis ikan demersal di Kabupaten Rembang telah mengalami kondisi tangkap lebih (*overfishing*) atau mencapai 159 % dari potensi lestarnya. Sedangkan, hasil penelitian Misuari (2006) juga menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan ikan demersal sebesar 82,23 % atau melebihi TAC (*Total Allowable Catch*) yaitu 80% dari potensi lestarnya.

Kondisi tersebut berpotensi menurunkan pendapatan nelayan, karena sumberdaya ikan demersal, diantaranya: kakap merah, bawal hitam, kerapu, kakap, manyung, merupakan komoditas unggulan perikanan Kabupaten Rembang. (Profil Perikanan Tangkap Jawa Tengah, 2006).

Pemanfaatan sumber daya ikan demersal yang berlebih (*overfishing*) di Kabupaten Rembang tidak lepas dari pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik kapal (nelayan), yaitu dengan tidak melakukan perpanjangan surat perijinan penangkapan SIUP dan SIPI (Suara Merdeka, 2005). Pelanggaran lain yang dilakukan, diantaranya pelanggaran jalur penangkapan ikan yang merusak biota laut, dan memicu konflik diantara sesama nelayan, serta pemalsuan data dokumen kapal (ukuran *GT*).

Dalam rangka pemanfaatan sumberdaya ikan demersal yang berkelanjutan di Kabupaten Rembang, diperlukan pendekatan *Co-Management* untuk menjawab permasalahan pengelolaan sumberdaya ikan demersal di Kabupaten Rembang yang tidak terpisahkan dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan menemukan bentuk pengelolaan yang sinergi antar *stakeholders*.

REVIEW LITERATUR

Konsep Keberlanjutan Dalam Perikanan

Paradigma pembangunan perikanan pada dasarnya mengalami evolusi dari paradigma konservasi (biologi) ke paradigma rasionalisasi (ekonomi) kemudian ke paradigma sosial. Namun

walaupun demikian menurut Charles (1994) ketiga paradigma tersebut masih tetap relevan dalam kaitan dengan pembangunan perikanan yang berkelanjutan. Dengan demikian menurut Charles (1994) pandangan pembangunan perikanan yang berkelanjutan haruslah mengkomodasikan ketiga aspek tersebut di atas. Oleh karenanya konsep pembangunan perikanan yang berkelanjutan sendiri mengandung aspek (Fauzi dan Anna, 2005):

1. *Ecological sustainability* (keberlanjutan ekologi). Dalam pandangan ini memelihara keberlanjutan stok sehingga tidak melewati daya dukungnya, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas dari ekosistem menjadi fokus utama.
2. *Socioeconomic sustainability* (keberlanjutan sosioekonomi). Konsep ini mengandung makna bahwa pembangunan perikanan harus memperhatikan keberlanjutan dari kesejahteraan pelaku perikanan.
3. *Community sustainability*, mengandung makna bahwa keberlanjutan kesejahteraan dari sisi komunitas atau masyarakat haruslah menjadi perhatian pembangunan perikanan yang berkelanjutan.
4. *Institutional sustainability* (keberlanjutan kelembagaan). Dalam kerangka ini keberlanjutan kelembagaan yang menyangkut pemeliharaan aspek finansial dan administrasi yang sehat merupakan prasyarat dari ketiga pembangunan berkelanjutan di atas.

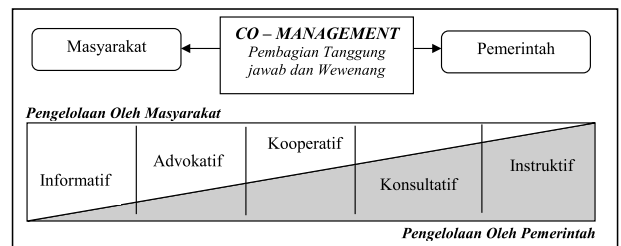
Co-Management

Salah satu bentuk pengelolaan sumber daya yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumberdaya perikanan adalah melalui pendekatan kemitraan. Pomeroy dan Williams (1994), mengemukakan bahwa pendekatan kemitraan (*Co-Management*) adalah pendekatan berbagi tanggung jawab antara pihak – pihak terkait seperti pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya atau

lingkungan. Penjelasan singkat mengenai bentuk *Co-Management* menurut Pomeroy *et al.* (1994) dalam Nikijuluw (2002) adalah sebagai berikut :

1. *Co-Management Instructive*, pada bentuk ini, tidak begitu banyak informasi yang saling di pertukarkan antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini, hanya menginformasikan kepada masyarakat tentang rumusan-rumusan pengelolaan sungai yang pemerintah rencanakan untuk dilaksanakan.
2. *Co-Management Consultative*, menempatkan masyarakat pada posisi yang hampir sama dengan pemerintah. Ada mekanisme yang membuat pemerintah berkonsultasi dengan masyarakat. Meskipun masyarakat bisa memberikan masukan pada pemerintah, keputusan tergantung sepenuhnya pada pemerintah.
3. *Co-Management Cooperative*, bentuk ini menempatkan masyarakat dan pemerintah pada posisi yang sama atau sederajat. Semua tahapan sejak pengumpulan informasi, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pemantauan institusi *co-management* berada di pundak kedua pihak.
4. *Co-Management Advocative*, pada bentuk ini, peran masyarakat cenderung lebih besar dari peran pemerintah. Peran pemerintah lebih banyak bersifat mendampingi masyarakat atau memberikan advokasi pada masyarakat tentang apa yang sedang mereka kerjakan.
5. *Co-Management Informative*, di satu pihak peran pemerintah makin berkurang dan di pihak lain peran masyarakat lebih besar. Pemerintah menerapkan delegasi untuk bekerja sama dengan masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan sungai, sejak pengumpulan data, perumusan kebijakan, implementasi, serta pemantauan dan evaluasi. Hasil pekerjaan delegasi pemerintah dilaporkan atau diinformasikan yang bersangkutan pada pemerintah.

Gambar 1
Bentuk *Co-Management*



Sumber : Modifikasi dari Pomeroy *et al.* (1994) Nikijuluw (2002)

Menurut Nikijuluw (2002), pada hakikatnya melalui *Co-Management*, pemerintah memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa keputusan yang diambil ternyata bisa secara efektif dilaksanakan. Dimata masyarakat *Co-Management* membawa manfaat melalui partisipasi atau keikutsertaan dalam proses pengambilan keputusan.

Sumberdaya Ikan Demersal

Sumberdaya ikan demersal adalah golongan ikan yang hidupnya di dasar perairan yang terbatas pada daerah sampai kedalaman 100 meter (Direktorat Jenderal Perikanan, 1987). Menurut Dwiponggo, *et al* dalam Martosubroto, *et al* (1991), ikan demersal merupakan salah satu kelompok jenis ikan laut yang hidup di dasar perairan atau dekat perairan, ruaya yang tidak terlalu jauh, dan punya aktivitas gerak yang relatif rendah dan lambat.

Kapal Cantrang

Berdasarkan keterangan DPK Kabupaten Rembang, Misuari dan Sutradji (2006) kapal cantrang merupakan alat tangkap dominan yang digunakan nelayan Kabupaten Rembang untuk penangkapan ikan demersal.

Cantrang atau dogol (*danish seine*) adalah alat penangkap ikan yang mempunyai sayap, badan, kantong dan dilengkapi dengan tali temali, pelampung, pemberat. Dengan demikian dilihat dari segi bentuk dan konstruksi alat ini mirip

dengan payang dan digunakan untuk menangkap ikan terutama ikan demersal di perairan teritorial pada jalur I dan II di seluruh perairan Indonesia (Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, 2004).

Regulasi Sumberdaya Perikanan

Adapun regulasi pemerintah yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan di Kabupaten Rembang, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2
Regulasi Sumberdaya Perikanan yang Relevan

| No | Regulasi | Penjelasan |
|----|--|--|
| 1 | UU RI No. 31 Tahun 2004 | Perikanan |
| 2 | UU RI No. 32 Tahun 2004 | Otonomi daerah |
| 3 | Perda Propinsi Jawa Tengah No.3 Tahun 2005 | Perizinan usaha perikanan |
| 4 | Perda Kabupaten Rembang No. 3 Tahun 2005 | Retribusi Surat Tanda Kebangsaan Kecil (Pas Kecil) |
| 5 | PP No.4 Tahun1993 | Usaha perikanan |
| 6 | Kep. Men. Pertanian No.392/ kpts/ik.120/4/1999 | Jalur-jalur penangkapan ikan |
| 7 | Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tk.1 Jawa Tengah 26 Mei 1986 No. 523/173/1986 | Pencegahan/larangan usaha/tindakan yang dapat mengakibatkan pencemaran/kerusakan sumberdaya ikan di perairan umum/laut di Propinsi Daerah Tk.1 Jawa Tengah |
| 8 | Kep. Bupati Rembang No.207 Tahun 2004 | Tim Operasional Patroli Laut di Wilayah Perairan Laut Kabupaten Rembang. |

Sumber: Berbagai publikasi

METODE PENELITIAN

Data dan Sampel

Data primer diperoleh dari responden melalui wawancara yang dipandu dengan kuesioner pada seluruh *stakeholders* tokoh kunci (*key-persons*). Sedangkan, data sekunder diperoleh melalui studi literatur terhadap bahan-bahan pustaka dan data dari lembaga pemerintah setempat.

Pendistribusian sampel *Co-Management*, secara *purposive* berjumlah 30 (sampel kecil) , yang meliputi: pemerintah kabupaten (dinas perikanan dan kelautan, dinas perhubungan, dinas lingkungan hidup, dinas kehutanan (*mangrove*), syahbandar, BAPPEDA), pemerintah desa, (kepala desa Tasikagung dan Tanjungsari), tokoh masyarakat, paguyuban dan kelompok nelayan. Pihak lainya adalah: KUD Saroyo Mino, LSM dan pengusaha, kepala TPI: Tasikagung-1, Tasikagung-2, dan Tanjungsari, dan akademisi: Universitas Diponegoro. Responden merupakan tokoh kunci (*key-persons*) yang berpengalaman terhadap kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan demersal di Kabupaten Rembang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni-Agustus tahun 2007.

Tabel 3
Distribusi Sampel Co-Management: Key-Persons

| Uraian | Jumlah |
|-----------------------------|-----------|
| 1. Pemerintah Kabupaten | 10 |
| 2. Pemerintah Desa | 2 |
| 3. Tokoh masyarakat/nelayan | 7 |
| 4. KUD | 3 |
| 5. LSM | 2 |
| 6. Pengusaha | 2 |
| 7. Pengurus TPI | 3 |
| 8. Akademisi | 1 |
| Total | 30 |

Sumber: Data primer, 2007

Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis institusional yang direkomendasikan oleh ICLARM (Pomeroy dan William, 1994 *dalam* Susilowati, 1999). Analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan skala konvensional (1-10):

- a. Skala 1-4 menunjukkan nilai rendah atau sangat tidak setuju (*Poor*)
- b. Skala 5-7 menunjukkan nilai sedang atau biasa-biasa saja (*Average*)
- c. Skala 8-10 menunjukkan nilai tinggi atau sangat setuju (*Excellent*)

Adapun atribut yang diukur dan dianalisis dalam penelitian ini, adalah :

1. Atribut Fisik, mengukur kondisi fisik dan teknik perairan. Dalam penelitian ini pengukuran tidak dilakukan, sehingga menggunakan data sekunder.
2. Atribut Masyarakat, mengukur usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan aktivitas sosial responden masyarakat.
3. Atribut Institusi, mengukur keanggotaan, kohesi group, organisasi yang ada, batas-batas pengelolaan, manfaat dan pengorbanan, partisipasi masyarakat, aturan, legalitas, kerjasama dan kepemimpinan di tingkat masyarakat koordinasi, dan pendelegasian kekuasaan.
4. Atribut Aktor, mengukur peran pemerintah, masyarakat, pengusaha, dan akademisi dalam kegiatan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, dan evaluasi.
5. Atribut Permintaan dan Penawaran, mengukur derajat komersialisasi dan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Dalam penelitian ini, aspek derajat komersialisasi dengan menganalisis peluang pasar produk ikan demersal di Kabupaten Rembang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Co-Management: Atribut Fisik

Atribut fisik dianalisis secara deskriptif berdasarkan hasil penelitian mengenai kondisi fisik pesisir Kabupaten Rembang yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Rembang dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, UNDIP (2001), adalah:

1. Suhu Permukaan Laut (SPL) perairan berkisar antara 25-29°C dan kadar garam (salinitas) berkisar antara 30-34 psu (*promil salinity unit*). sebaran salinitas rendah antara Kaliori dan Tanjungsari adalah karena adanya aliran masa air tawar dari muara sungai Kali Kurir/ Kali Pricer.
2. Sebaran hara penting *N-Nitrat* berkisar antara 0,01 sampai 0,138 mg/l dan *P-Fosfat* antara 0,01-0,029 mg/l dapat dibuat juga pola sebaran *N/P-ratio*, yang secara kaidah ekosistem dipercaya lebih mengindikasikan nilai kesuburan perairan setempat.
3. Berdasarkan analisis citra data satelit Landsat_ETM7 yang diolah diketahui bahwa terjadi proses sirkulasi masa air di perairan pantai dengan tingkat kekeruhan yang cukup tinggi di sepanjang pantai. Hal ini akan menghambat proses fotosintesis.
4. Kepadatan/kelimpahan biomassa fitoplankton di perairan Rembang dan sekitarnya (dari pantai sampai jarak sekitar 25 mil) berkisar antara 12-109 ind/ml adalah cukup baik bagi suatu lingkungan perairan yang subur.
5. Pola kepadatan zooplankton cenderung rendah di sekitar pantai Kaliori dan Tanjungsari dan nampak lebih menyebar dan lebih tinggi kepadatannya ke arah Timur. Hal ini diindikasikan karena Pantai Kaliori dan Tanjungsari terlalu dekat dengan permukiman dan penurunan kualitas perairan.

Analisis Co-Management: Atribut Masyarakat

Berdasarkan kelompok usia dapat dilihat bahwa kelompok usia 41-50 sebesar 53,3 persen dari jumlah responden *key-persons*, merupakan kelompok umur yang paling banyak berperan dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya ikan demersal di Kabupaten Rembang didominasi oleh laki-laki sebesar 93,3 persen.

Tabel 4
Karakteristik Responden

| No | Deskripsi | Frekuensi | Persentase (%) |
|----|-------------------------------|-----------|----------------|
| 1 | Usia (Tahun) | | |
| | • < 30 | 1 | 3 |
| | • 31-40 | 9 | 33 |
| | • 41-50 | 16 | 53,3 |
| | • > 50 | 4 | 13,3 |
| 2 | Jenis Kelamin | | |
| | • Laki-laki | 28 | 93,3 |
| | • Perempuan | 2 | 6,7 |
| 3 | Asal Pekerjaan | | |
| | • Pemerintah (Kab,Dinas,Desa) | 12 | 40 |
| | • Tokoh Masyarakat/ Nelayan | 7 | 23,3 |
| | • KUD | 3 | 10 |
| | • LSM | 2 | 6,7 |
| | • Pengusaha | 2 | 6,7 |
| | • Pengurus TPI | 3 | 10 |
| | • Pengurus TPI | 1 | 3,3 |
| 4 | Akademisi Pendidikan | | |
| | • Tidak tamat/sekolah | 2 | 6,7 |
| | • Tidak tamat/sekolah | 6 | 20 |
| | • SD | 2 | 6,7 |
| | • SMP | 3 | 10 |
| | • SMU | 3 | 10 |
| | • SMU | 1 | 3,3 |
| | • D2 | 7 | 23,3 |
| | • D4/S1 | 5 | 16,7 |
| | • S2 | 1 | 3,3 |
| | • S3 | 3 | 10 |
| | • Abstain | | |

Sumber: Data primer (diolah), 2007

N = 30

Tingkat pendidikan *key-persons* didominasi oleh tingkat pendidikan D4/S1 sebanyak 23,3 persen. Dengan asal pekerjaan terbanyak berasal dari pemerintah yang meliputi: pemerintah kabupaten, dinas, dan desa, yaitu 40 persen dari jumlah responden *key-persons*.

Analisis Co-Management: Atribut Institusi

Atribut institusi merupakan komponen-komponen yang terkait dengan institusi sebagai lembaga yang diharapkan mengelola sumberdaya perikanan sesuai dengan fungsi dan manfaat (Alikodra, 2000). Dalam atribut institusi terlihat bahwa kohesi grup (7,40), manfaat dan pengorbanan (7,32), aturan pengelolaan yang ditegakkan (7,43), legalitas untuk berorganisasi (7,31), kerjasama dan kepemimpinan di tingkat masyarakat (7,82), desentralisasi dan pendelegasian kekuasaan (7,58), koordinasi antara pemerintah dan masyarakat (7,51) adalah kondisi kunci penting bagi keberhasilan pendekatan kemitraan (*Co-Management*) di Kabupaten Rembang, dengan prioritas pada kondisi desentralisasi dan pendelegasian kekuasaan, dan kerjasama dan kepemimpinan di tingkat masyarakat. Nilai prospek keberhasilan pendekatan kemitraan pada pengelolaan sumberdaya ikan demersal di Kabupaten Rembang adalah 78,42 dengan rata-rata 7,13 yang menunjukkan bahwa prospek keberhasilan pendekatan kemitraan adalah sedang atau biasa saja (*average*).

Tabel 5
Kondisi Kunci Untuk Keberhasilan Pendekatan *Co-Management*

| No | Kondisi Kunci | Skor |
|-----------|--|-------|
| 1 | Batas-batas yang jelas | 6,36 |
| 2 | Keanggotaan yang telah ditentukan secara jelas | 6,52 |
| 3 | Kohesi Grup | 7,40 |
| 4 | Organisasi yang ada | 6,94 |
| 5 | Manfaat dan Pengorbanan | 7,32 |
| 6 | Partisipasi Masyarakat / Pihak yang berkompeten | 6,23 |
| 7 | Aturan pengelolaan yang ditegakkan | 7,43 |
| 8 | Legalitas untuk berorganisasi | 7,31 |
| 9 | Kerjasama dan kepemimpinan di tingkat masyarakat | 7,82 |
| 10 | Desentralisasi dan pendelegasian kekuasaan | 7,58 |
| 11 | Koordinasi antara pemerintah dan masyarakat | 7,51 |
| Total | | 78,42 |
| Rata-rata | | 7,13 |

Sumber: Data Primer (diolah), 2007

Analisis *Co-Management*: Atribut Aktor

Peran aktor tokoh kunci (*key-persons*) memegang peranan penting baik dalam kegiatan pengelolaan maupun pemanfaatan sumberdaya ikan demersal di Kabupaten Rembang. Sehingga, diperlukan evaluasi untuk melihat besarnya peran *stakeholders* dalam pengelolaan sumberdaya ikan demersal di Kabupaten Rembang (Tabel 6).

Tabel 6
Evaluasi Peran *Stakeholder* dalam Pengelolaan Sumberdaya Ikan Demersal

| No | Kegiatan | Peran <i>Stakeholder</i> | | | |
|------------------|--|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Pem | Masy | Peng | Unv/LSM |
| 1 | Perencanaan: | | | | |
| | a. Penentuan inisiatif tentang program/kegiatan | 7,88 | 6,37 | 4,07 | 4,53 |
| | b. Penetapan/pengambilan keputusan | 7,98 | 6,20 | 4,13 | 4,13 |
| | c. Keterlibatan dalam intensitas pertemuan | 7,85 | 6,60 | 4,30 | 4,33 |
| | d. Derajat penyampaian usul/materi pertemuan | 7,48 | 6,17 | 4,80 | 5,03 |
| 2 | Pengorganisasian: | | | | |
| | a. Keterlibatan dalam penyelenggaraan program /kegiatan | 8,00 | 7,03 | 4,27 | 4,47 |
| | b. Daerah peranan dalam pengorganisasian program/kegiatan | 7,97 | 6,80 | 4,17 | 4,40 |
| | c. Frekuensi keterlibatan dalam aktivitas program/kegiatan | 7,93 | 7,00 | 4,23 | 4,50 |
| 3 | Pelaksanaan: | | | | |
| | a. Keterlibatan dalam pelaksanaan program | 8,00 | 7,50 | 4,70 | 4,77 |
| | b. Derajat peranan dalam pengelolaan program | 8,00 | 7,43 | 4,70 | 4,97 |
| | c. Derajat <i>benefit</i> (manfaat) dari program | 7,47 | 7,60 | 4,80 | 5,15 |
| | d. Derajat respon terhadap pelaksanaan program /kegiatan | 7,57 | 7,60 | 4,80 | 5,30 |
| 4 | Kontrol: | | | | |
| | a. Penglibatan dalam <i>monitoring</i> (pengawasan) | 7,17 | 7,17 | 4,27 | 5,17 |
| | b. Penglibatan dan evaluasi (target vs realisasi) | 7,60 | 6,67 | 4,27 | 4,83 |
| | c. Rekomendasi yang diberikan untuk perbaikan program/kegiatan | 7,63 | 6,47 | 4,30 | 4,73 |
| Rata-Rata | | 7,76 | 6,90 | 4,40 | 4,73 |

Sumber: Data Primer (diolah), 2007

Stakeholders yang dikategorikan sebagai *key-persons* terdiri dari: pemerintah daerah, masyarakat sekitar yang memanfaatkan sumberdaya perikanan, pengusaha yang berada disekitar perairan Kabupaten Rembang dan memanfaatkannya, LSM, dan akademisi. Aktor pemerintah yang dievaluasi merupakan pemerintah di tingkat Kabupaten Rembang. Detil dari evaluasi peran *stakeholders* dalam pengelolaan sumberdaya ikan demersal di Kabupaten Rembang dinilai berdasarkan empat kegiatan, adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Peran *Stakeholder* dalam perencanaan dievaluasi dengan nilai rata-rata (*average score*) masing-masing: pemerintah (7,83), masyarakat (6,35), pengusaha (4,33), dan universitas/LSM (4,48).

Secara keseluruhan, pemerintah memiliki peran paling baik (*Excellent*) dalam kegiatan perencanaan: penentuan inisiatif tentang program/kegiatan (7,88), dan pengambilan keputusan (7,98). Sedangkan, masyarakat memiliki peran biasa saja (*average*), dengan kontribusi paling baik dalam kegiatan perencanaan: keterlibatan/intensitas pertemuan (6,6). Hal tersebut disebabkan oleh minimnya inisiatif dan partisipatif masyarakat dalam perencanaan program, sehingga dapat dikatakan pola *top-down* lebih melekat dalam pengelolaan sumberdaya ikan demersal di Kabupaten Rembang.

b. Pengorganisasian

Peran *Stakeholder* dalam pengorganisasian dievaluasi dengan nilai rata-rata (*average score*) masing-masing: pemerintah (7,97), masyarakat (6,93), pengusaha (4,23), dan universitas/LSM (4,47).

Secara keseluruhan pemerintah memiliki peran paling baik (*Excellent*) dalam kegiatan pengorganisasian: keterlibatan dalam penyelenggaraan program/kegiatan (8,00), dan daerah peranan dalam pengorganisasian program/kegiatan (7,97). Sedangkan, masyarakat memiliki peran

biasa saja (*average*) dengan kontribusi peran paling baik dalam kegiatan pengorganisasian: keterlibatan dalam penyelenggaraan program/kegiatan (7,03), dan frekuensi keterlibatan dalam aktivitas program/kegiatan (7,00). Hal tersebut disebabkan oleh minimnya inisiatif dan partisipatif masyarakat dalam pengorganisasian program, sehingga dapat dikatakan pemerintah merupakan aktor utama dalam kegiatan pengorganisasian pengelolaan sumberdaya ikan demersal di Kabupaten Rembang.

c. Pelaksanaan

Peran *Stakeholder* dalam pelaksanaan dievaluasi dengan nilai rata-rata (*average score*) masing-masing: pemerintah (7,78), masyarakat (7,53), pengusaha (4,75), dan univ./LSM (5,08).

Secara keseluruhan pemerintah memiliki peran paling baik (*Excellent*) dalam kegiatan pelaksanaan: keterlibatan dalam pelaksanaan program (8,00), dan derajat peranan dalam pengelolaan program (8,00). Sedangkan, masyarakat memiliki peran paling baik (*Excellent*) dalam kegiatan pelaksanaan: derajat *benefit* (manfaat) dari program (7,60), dan derajat respon terhadap pelaksanaan program (7,60).

Sejajarnya nilai rata-rata evaluasi peran masyarakat (7,53) dan pemerintah (7,78) dalam kegiatan pelaksanaan menunjukkan bahwa masyarakat dan pemerintah merupakan aktor utama dalam kegiatan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya ikan demersal di Kabupaten Rembang pada khususnya.

d. Kontrol

Peran *stakeholders* dalam aspek kontrol dievaluasi dengan nilai rata-rata (*average score*) masing-masing: pemerintah (7,47), masyarakat (6,8), pengusaha (4,3), dan univ./LSM (4,9).

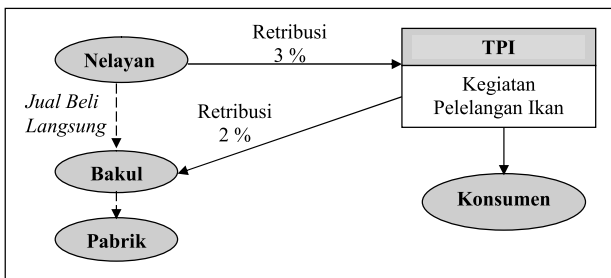
Secara keseluruhan pemerintah memiliki peran paling baik (*Excellent*) dalam kegiatan kontrol: rekomendasi yang diberikan untuk program/kegiatan (7,63), dan penglibatan dan evaluasi (target vs realisasi) (7,6). Sedangkan,

masyarakat memiliki peran biasa saja (*marginal*) dalam kegiatan kontrol: penglibatan dalam *monitoring* (pengawasan) (7,17), dan rekomendasi yang diberikan untuk program/kegiatan (6,47). Tingginya nilai rata-rata evaluasi peran pemerintah dinilai cukup baik dalam kegiatan kontrol menunjukkan bahwa pemerintah merupakan aktor utama dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya ikan demersal di Kabupaten Rembang.

Analisis Co-Management: Atribut Permintaan dan Penawaran

Atribut permintaan dan penawaran dapat dilihat dari kondisi penjualan dan pemasaran ikan demersal yang berhasil ditangkap. Dalam menunjang penjualan dan pemasaran produk ikan demersal, peran TPI perlu ditinjau sebagai berikut:

Gambar 2
Aktifitas Pelelangan Ikan di TPI Tanjungsari dan PPP Tasikagung-2



Keterangan: ----- Aktifitas TPI ----- Aktifitas Non-TPI
Sumber: Data primer (diolah), 2007

Dalam proses penjualan hasil tangkapan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Tanjungsari. Terdapat dua macam aktifitas penjualan yaitu: mekanisme lelang oleh TPI dan mekanisme langsung oleh *bakul* (pedagang ikan). Mekanisme lelang dilakukan untuk jenis ikan demersal: petek, ekor kuning, tiga waja, pari atau *peh*, yang dikenakan retribusi sesuai Perda No. 10 Tahun 2003, yaitu 3 persen kepada nelayan, dan 2 persen kepada *bakul*, setelah selesai proses

pelelangan. Sedangkan, mekanisme langsung, biasanya dilakukan untuk ikan *pirik* yang digunakan untuk bahan pakan ternak, dan ikan bawal putih yang bernilai ekonomis tinggi (\bar{x} = Rp 80.000 per kg) yang disetorkan langsung via *bakul* kepada pabrik atau usaha pengolahan ikan. Berdasarkan observasi dan wawancara, kinerja TPI Tanjungsari adalah baik (*good*), karena dapat memenuhi proses penjualan hasil tangkapan nelayan rata-rata sebesar 90 persen dari total tangkapan ikan demersal yang dilelang di TPI.

Perbedaan yang kontras terjadi di PPI Tasikagung-2, berdasarkan observasi dan wawancara, kinerja TPI Tasikagung-2 adalah buruk (*poor*) karena hanya dapat memenuhi proses penjualan hasil tangkapan nelayan rata-rata sebesar 5 persen dari total tangkapan ikan demersal yang dilelang di TPI, sedangkan sisanya sebesar 95 persen penjualan dilakukan via *bakul*. Hal tersebut disebabkan oleh faktor keterbatasan finansial (keuangan) TPI, sehingga tidak mampu melayani transaksi pelelangan.

Akibat ketidakmampuan tersebut menyebabkan nilai harga pada proses pelelangan ikan di TPI Tasikagung-2 menjadi lebih fluktuatif dibandingkan dengan TPI Tanjungsari yang cenderung stabil sepanjang tahun. Dengan demikian dalam rangka menjaga penjualan hasil perikanan yang menguntungkan nelayan, diperlukan perbaikan kinerja di TPI Tasikagung-2.

Dalam hal produksi perikanan tangkap di Kabupaten Rembang, pada umumnya adalah ikan layang, kemudian ikan tembang atau *juji*, ikan selar dan ikan kembung, yang merupakan ikan jenis pelagis kecil. Adapun hasil tangkapan ikan demersal pada umumnya disetorkan langsung ke pabrik atau usaha pengolahan ikan, diantaranya spesies ikan demersal yang dimaksud adalah kakap merah, dan bawal putih (*silver prompt*).

Hasil perikanan tersebut dipasarkan sampai Semarang, Yogyakarta, Lampung, Jambi, dan sekitar Sumatera bagian tengah, bahkan sampai ke luar negeri. Namun, ekspor masih dilakukan

lewat Semarang dan Surabaya, karena di Kabupaten Rembang belum memiliki perwakilan/agen.

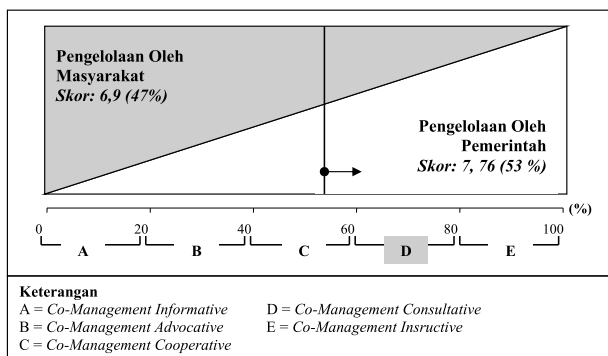
Pada dasarnya peluang pemasaran produk ikan demersal Kabupaten Rembang masih cukup luas, yaitu dengan memperluas penjualan produk ke daerah-daerah potensial pengeluaran konsumsi ikannya tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Daerah-daerah yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut: Kabupaten Jepara, Demak, Pati, dan Kudus. Daerah tersebut juga mudah diakses mengingat daerah tersebut posisinya sejajar dengan jalur transportasi dari dan ke Kabupaten Rembang di dalam jalur transportasi nasional Pantura.

Bentuk Co-Management

Bentuk *co-management* pengelolaan sumberdaya perikanan di Kabupaten Rembang hingga saat ini cenderung kepada bentuk *Co-Management Consultative* (huruf D), yang menempatkan masyarakat pada posisi yang hampir sama dengan pemerintah. Menurut Pomeroy (1994) bentuk *Co-Management Consultative* cirinya terjadi mekanisme yang membuat pemerintah berkonsultasi dengan masyarakat, meskipun masyarakat bisa memberikan berbagai masukan pada pemerintah, keputusan apakah masukan tersebut harus digunakan, tergantung sepenuhnya pada pemerintah.

Gambar 3

Bentuk Co-Management Sumberdaya Ikan Demersal di Kabupaten Rembang



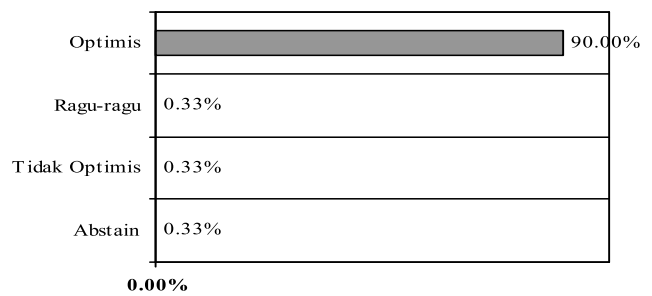
Sumber: Data primer (diolah),

Optimisme Penerapan Co-Management

Mengenai optimisme *key-persons* terhadap penerapan pendekatan kemitraan (*Co-Management*) dalam pengelolaan sumberdaya ikan demersal di Kabupaten Rembang, sebanyak 90 persen responden menjawab optimis dengan skor 8,33. Mayoritas responden sangat yakin dengan pendekatan *Co-Management* yang bersifat partisipatif (*bottom-up planning*) akan memberikan hasil yang paling maksimal dengan pengorbanan yang minimal. Optimisme responden *key-persons* tersebut merupakan potensi strategis dalam mengelola sumberdaya ikan demersal secara berkelanjutan dan menguntungkan bagi *stakeholders*.

Gambar 4

Optimisme Key-Persons Terhadap Penerapan Co-Management

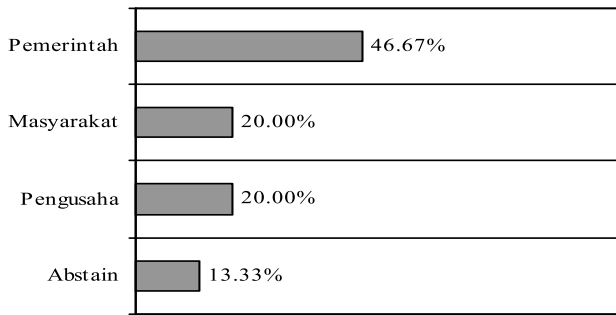


Sumber: Data primer (diolah),

Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya

Dalam mensukseskan penerapan *Co-Management*, diperlukan koordinator yang mampu mengelola kelembagaan pengelolaan sumberdaya ikan demersal agar penerapan pendekatan kemitraan (*Co-Management*) dapat tercapai. Berdasarkan hasil wawancara mengenai *siapa yang paling layak menjadi koordinator dalam pengelolaan sumberdaya ikan demersal di Kabupaten Rembang*, sebagian besar *key-persons* menjawab pemerintah paling layak menjadi koordinator pengelolaan sumberdaya ikan demersal sebanyak 46,67 persen, adapun masyarakat dan pengusaha masing-masing 20 persen, dan yang abstain sebanyak 13,33 persen.

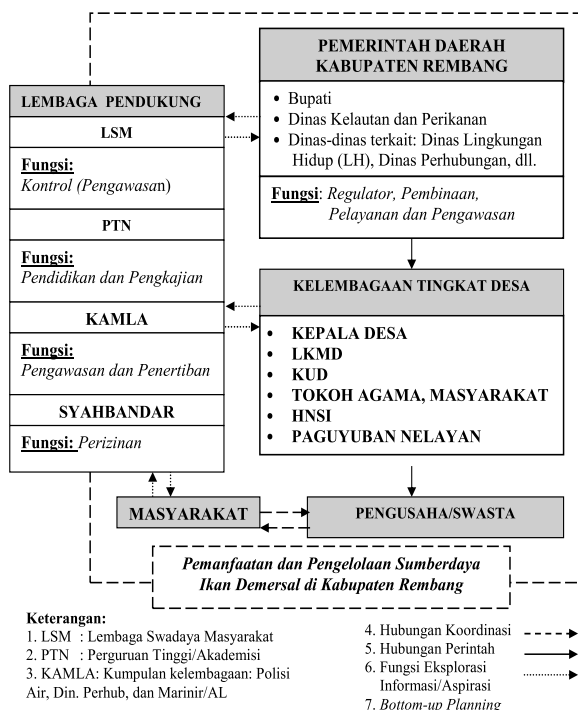
Gambar 5
Persepsi Key-Persons “Siapa yang Paling Layak Menjadi Koordinator?”



Sumber: Data Primer (diolah), 2007

Berdasarkan wawancara dengan *key-persons*, maka didapatkan bentuk koordinasi dalam pengelolaan sumberdaya ikan demersal di Kabupaten Rembang dengan penerapan pendekatan *Co-Management*, sebagai berikut (lihat Gambar 6):

Gambar 6
Manajemen Pengelolaan Sumberdaya Ikan Demersal Di Kabupaten Rembang:



Sumber: Data primer (diolah), 2007

1. *Stakeholders*, diantaranya: Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang (Bupati, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan dinas-dinas terkait), lembaga pendukung (LSM, PT/akademisi, KAMLA, syahbandar), kelembagaan tingkat desa (kepala desa, LKMD, KUD, tokoh agama dan masyarakat, HNSI, paguyuban nelayan, masyarakat, dan swasta/pengusaha).
2. Pemerintah daerah Kabupaten Rembang dan kelembagaan tingkat desa dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan kontrol atau evaluasi harus melibatkan LSM, akademisi, KAMLA, dan syahbandar.
3. Swasta atau Pengusaha diharapkan dapat bertindak sebagai pengelola kegiatan ekonomi yang berkoordinasi dengan masyarakat. Sehingga, diharapkan terciptanya pengelolaan sumberdaya yang efektif dan efisien, ramah lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat nelayan.
4. *Stakeholders* terkoordinasi secara *bottom-up planning* (partisipatif aktif) yang sinergi dan harmonis dalam lingkup pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan demersal di Kabupaten Rembang.
5. Semakin meningkatnya kemandirian masyarakat (*Excellent on economic and environment*), maka *Co-Management Informative* akan terwujud.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Penilaian prospek keberhasilan pendekatan kemitraan pada sumberdaya ikan demersal di Kabupaten Rembang adalah sedang atau biasa-biasa saja (average), dengan nilai rata-rata 7,13.
2. Bentuk *Co-Management* pengelolaan sumberdaya ikan demersal di Kabupaten Rembang adalah *Co-Management Consultative*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alikodra, H.S, 2001, **Konsep Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu**, dalam Prosiding Diskusi Panel Sistem Pengelolaan Terpadu Daerah Aliran Sungai. Kerjasama Tehnik Pemerintah Indonesia-Pemerintah Federal Jerman. Kantor Kementrian Negara Lingkungan Hidup/BAPEDAL-GTZ, Jakarta
- Anderson, LG, 1986, **The Economic of Fisheries Management**, The John Hopkins University: USA.
- Bagian Proyek Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan-Balai Pengembangan Penagakapan Ikan, 1996, **Klasifikasi Alat Penangkap Ikan yang Disesuaikan untuk Perairan Indonesia**, Semarang
- Dwiponggo, Aloysius, 1992, **Pengkajian Perkiraan Potensi Sumberdaya Perikanan dan Tingkat Pengusahaanya di Perairan Utara Jawa**, Balai Penelitian Perikanan Laut. Departemen Perikanan, Jakarta
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, 2007, **Profil Perikanan Kabupaten Rembang**, Rembang (tidak dipublikasikan)
- Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, 2004, **Standar Operasional dan Prosedur Pengawasan Penangkapan Ikan**, Jakarta.
- Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro, 2002, **Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Spesifik Lokal di Pantai Utara Jawa Tengah**, Semarang
- Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro, 2003, **Pengembangan Basis Data Kelautan Dan Perikanan**, Semarang
- Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro, 2001, **Pemetaan Digital Dan Sumberdaya Hayati Wilayah Pesisir Kabupaten Rembang**, Kerjasama dengan BAPPEDA Kabupaten Rembang, Semarang
- Fauzi dan Anna, 2005, **Permodelan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan**, PT. Gramedia Pustaka: Jakarta
- Fauzi, Akhmad, 2005, **Kebijakan Perikanan dan Kelautan: Isu, Sintesis, dan Gagasan**, Gramedia Pustaka: Jakarta
- Misuari, 2006, **Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Cantrang Sesuai Dengan Code of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF) di Perairan Rembang Jawa Tengah**, Skripsi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro, Semarang (tidak dipublikasikan)
- Nikijuluw Victor, P.H, 2002, **Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan**, Pustaka Cisendo, Jakarta
- Pomeroy, Robert S. dan William Meryl J., 1994, **Fisheries Co-Management and Small-Scale Fisheries: A Policy Brief**, ICLARM, Manila
- Susilowati, Indah, 2006, **Keselarasan dalam pemanfaatan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Bagi Manusia dan Lingkungan**, dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang
- _____, 2002, **Will Co-Management Approach Bring A Good Prospect For Babon River Management In Semarang, Central Java-Indonesia?**, dalam Journal of Coastal Development, Vol.1, Nom.1, Oktober 2002, Universitas Diponegoro, Semarang

_____, 1999, **An Analysis of Co-Management Fisheries In West Sumatra Province, Indonesia: A Case Study of Ikan Larangan**, Reserach Report, International Center For Living Aquatic Resource Management, Manila, Philipines

_____, 1998, **A Prospect of Introducing Co-Management System In Natural Resource Management In Indonesia: A Closer Look at Fisheries**, Tanzanian Journal of Population Studies and Development Vol. 5, No: 1 & 2

Sutardji, 2006, **Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Perairan Rembang Jawa Tengah**, Skripsi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro, Semarang (tidak dipublikasikan)

Kapal Cantrang di Tahan Di Surabaya, www.suaramerdeka.com, Download: 9/8/07